

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dampak atau pengaruh implementasi kebijakan pada audiens yang dituju, berlawanan dengan seberapa baik pelaksanaannya mematuhi, adalah seberapa efektif suatu kebijakan dijalankan. Misalnya, Penilaian Nasional akan menggantikan Ujian Nasional dan bertindak sebagai jadwal kursus sekolah dasar dan menengah dan sebagai pengukur standar pengajaran madrasah dan sekolah. Akankah penggunaan AKM mampu memilah-milah persoalan berbelit-belit menyerupai upaya UN yang mahal tanpa menurunkan standar pendidikan Indonesia, atau hanya proyek yang berdampak pada peningkatan pendidikan. Erwan Agus dan Dyah Ratih (2015).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru, yang kualitatif dan berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pendidikan (Rusyanti, 2013: 7). Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, program-program, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya ada yang berkaitan dengan Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada standar isi. Pada tanggal 15 Juli 2013, secara resmi Kurikulum 2013 dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia. Namun penerapannya masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kebijakan terbaru dari Kementerian pendidikan dalam usahanya untuk terus meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Berbicara tentang perbedaan antara Kurikulum 2013 dan KTSP, perbedaan yang paling menonjol adalah dalam KTSP, kegiatan mengenai pengembangan silabus merupakan kewenangan dari satuan pendidikan, sedangkan dalam kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kegiatan pengembangan silabus adalah kewenangan pemerintah, namun terdapat pengecualian untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus diberlakukan di satuan pendidikan tertentu. Kebijakan ini tentunya berdampak kepada mata pelajaran disetiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA. Salah satu mata pelajaran adalah Penjas, dengan perubahan kurikulum tentunya mata pelajaran penjas juga akan mengalami perubahan, apakah itu dari segi pembuatan Silabus, RPP, Buku, serta penilaiannya.

Masukan, prosedur, evaluasi hasil atau keluaran, pengaruh, dan umpan balik sedang berlangsung di seluruh sistem pendidikan. Elemen pertama dari proses berikut adalah input pendidikan, baik input mentah, seperti siswa, dan input instrumental, seperti guru, kurikulum, sarana pembelajaran, dan infrastruktur. Karena merupakan inti dari pembelajaran yang melibatkan banyak komponen yang saling berinteraksi secara berkelanjutan dan sinergis, maka proses pembelajaran menjadi komponen yang esensial. Evaluasi hasil atau keluaran merupakan langkah penting dalam menilai seberapa tinggi kaliber hasil pembelajaran yang diharapkan. Dampak atau hasil mengacu pada kegigihan hasil belajar dalam kehidupan siswa dan lembaga pendidikan yang secara umum lebih signifikan. Sementara hubungan masukan yang menyeluruh adalah umpan balik.

Dampak atau pengaruh implementasi kebijakan terhadap penerima manfaat dari pelaksana / pelaksana kebijakan, yang bertentangan dengan kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan, adalah yang menentukan apakah suatu kebijakan berhasil diimplementasikan. Untuk mengukur mutu pendidikan di semua sekolah dan madrasah, misalnya kebijakan Mengganti Ujian Nasional dengan Ujian Nasional, serta program pemerataan untuk tingkat SD dan SMP. Apakah penerapan AKM dapat mengurai benang kusut

yang menyerupai prakarsa PBB, yang menghabiskan banyak dana tanpa mengakibatkan turunnya standar pendidikan Indonesia, atau hanya proyek yang berdampak pada peningkatan pendidikan menjelaskan proses implementasi suatu kebijakan, dimulai dengan tujuan kebijakan dan input yang diperlukan untuk mencapainya, salah satunya adalah anggaran. Input ini akan ditangani dan diubah menjadi output kebijakan, atau secara sederhana output kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditentukan. Selain itu, kelompok sasaran menerima output kebijakan, menghasilkan hasil (Aisah, Zaqiah dan Supiana, 2021).

Jilid 1 menjelaskan bahwa mulai tahun ajaran 2020–2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Penilaian Kompetensi Minimum (AKM). Wabah Covid-19 memiliki manfaat yang tidak diharapkan dengan berakhirnya pelaksanaan UN pada tahun ajaran 2019–2020, kecuali yang telah dilaksanakan di tingkat SMK di provinsi tertentu. Ujian Nasional diadakan satu tahun lebih cepat dari yang dimaksudkan sesuai dengan Merdeka, sesuai dengan maknanya. mempelajari buku satu. Agar penerapan AKM pada tahun 2021 dapat berjalan dengan baik, kondisi ini harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..

Penilaian Kompetensi Minimum (AKM) mengevaluasi keterampilan dasar yang diperlukan semua siswa agar mereka tumbuh sebagai individu dan berkontribusi secara konstruktif kepada masyarakat. AKM menilai kemampuan dasar literasi membaca, matematika, dan mata pelajaran lainnya (memori). Kompetensi yang dinilai dalam literasi membaca dan berhitung meliputi kemampuan berpikir logis-sistematis, kemampuan menalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang diajarkan, serta kemampuan memilah dan mengolah informasi. Siswa diharapkan mampu menggunakan kemampuan literasi membaca dan berhitung untuk menjawab permasalahan yang disajikan dalam berbagai skenario oleh AKM. AKM berusaha untuk mengukur kompetensi yang komprehensif bukan hanya pengetahuan konten. Pada tahun 2021, Fauziah, Sobari, dan Robandi

Secara umum, penilaian terdiri dari semua teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan, kemampuan memahami, sikap, dan motivasi selain untuk mengevaluasi pengetahuan. Komponen penting dari kegiatan pembelajaran adalah penilaian, yang membantu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Metode penilaian yang terus dikembangkan tidak hanya sekedar merekam keterampilan dan kemampuan siswa. Ini berarti bahwa tes harus melacak kemajuan siswa dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan mereka. Selain itu, pengamatan kadang-kadang harus dikaitkan secara konseptual untuk memungkinkan pengamatan dan interpretasi perubahan. Pada tahun 2021, Fauziah, Sobari, dan Robandi

Penilaian Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengumpulkan data guna meningkatkan standar pengajaran dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pelaksanaan asesmen secara khusus dilakukan untuk mengidentifikasi mutu pendidikan secara keseluruhan dan meningkatkan mutu pendidikan yang masih kurang, bukan hanya mengukur penguasaan materi sesuai kurikulum. Terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi berhitung siswa merupakan tujuan utama AKM (Rohim, Rahmawati dan Ganestri, 2021)

Ada enam faktor yang menjadi penentu gagal tidaknya proses implementasi kebijakan, yaitu 1) kualitas kebijakan itu sendiri, diantaranya; kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab. Menurut de Leon (2002), kualitas kebijakan akan sangat ditentukan pada saat perumusan kebijakan, ketika dirumuskan secara demokratis, maka akan memberi peluang dihasilkan kebijakan yang berkualitas. 2) kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Menurut Wildavsky (1979), besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap sebuah kebijakan menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan. Dapat dikatakan besarnya alokasi anggaran menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap kebijakan tersebut, dan peluang keberhasilannya juga tinggi. 3) ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan

(pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya. 4) kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dll). 5) karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, sangat mempengaruhi terhadap proses implementasi kebijakan. Kelompok sasaran dimaksud, misalnya apakah individu, atau kelompok, perempuan atau laki-laki, terdidik atau tidak terdidik, dll. 6) kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik di mana implementasi itu dilakukan.

Asesmen kemampuan minimal (AKM) sebagai kebijakan baru dari Menteri, akan mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan bernalar menggunakan Bahasa (literasi membaca), dan kemampuan menghitung dengan mengaplikasikan konsep hitungan dalam sebuah konteks, baik abstrak ataupun nyata. Hal ini dikaitkan dengan tuntutan kecakapan abad 21, dimana literasi merupakan salah satu kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai peserta didik, agar mampu bersaing dengan dunia luar di era revolusi industri 4.0.

Tahap pertama Implementasi kebijakan AKM, sudah diawali dengan sosialisasi tujuan AKM, salah satu alasan AKM adalah untuk mengejar keterpurukan mutu pendidikan Indonesia, berdasarkan skor perolehan Pisa sebagai indikator mutu pendidikan sebuah negara. AKM tidak menilai kelulusan siswa, tetapi penekanannya untuk mengukur kemampuan sekolah dalam mempersiapkan siswanya agar mampu bersaing dengan dunia internasional, dalam menyongsong kecakapan abad 21, dimana literasi membaca dan numerasi menjadi salah satu indikator penentuan mutu pendidikan. World Economic Forum (2015) menetapkan enam literasi dasar, yaitu (a) literasi baca tulis, (b) literasi numerasi, (c) literasi sains, (d) literasi digital, (e) literasi finansial, dan (f) literasi budaya dan kewargaan.

Tahap kedua, terkait kecukupan input atau anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan AKM ini tampaknya tidak menjadi kendala, terutama sosialisasi menggunakan media internet, dirasa lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasi sebuah kebijakan. AKM yang akan dilaksanakan tahun 2021, Kemendikbud sudah mensosialisasikan ketika pelaksanaan Ujian Nasional terakhir digelar, pada tahun 2019, dengan

menyelipkan soal-soal AKM sebagai bentuk sosialisasi ke satuan pendidikan, terutama tenaga pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah.

Tahap ketiga, adalah ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, dalam hal kebijakan AKM, instrument yang digunakan sudah tepat, misalnya dengan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam mensosialisasikan program AKM sudah dilakukan melalui beberapa media. Kegiatan pelatihan salah bentuk instrument yang dilakukan kemendikbud, dengan melatih para fasilitator daerah, untuk sosialisasi AKM ke sekolah-sekolah.

Tahap keempat, mempersiapkan kapasitas implementors, yaitu kemampuan para stakeholder yang berkaitan dengan implementasi AKM. Kemendikbud, melalui dirjen kemdikbud, serta turunannya, melalui dinas-dinas pendidikan tingkat provinsi, dan kota, kemedibud dikdasmen, gencar melakukan implementasi kepada para kepala sekolah secara bertahap, melalui fasilitator implementator AKM yang terlatih. Disamping itu, kepada guruguru di satuan pendidikan, ditawarkan bimtek-bimtek secara mandiri dan virtual. Tahapan ini terus dilakukan sejak memasuki tahun ajaran 2020-2021. Tahapan-tahapan ini didukung dengan respon positif dari sekolah-sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, maupun siswa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan digantinya Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen kompetensi Minimum (AKM) Apakah Guru PJOK mengetahui, dan memahami implementasi AKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tentang pemahaman guru PJOK tentang implementasi AKM di SD Negeri Se- Kecamatan Sukosewu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Guru**

Bisa sebagai wawasan tambahan dan pengetahuan untuk meningkatkan mutu dan kinerja guru pada implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

#### **1.4.2 Bagi Siswa**

Meningkatkan dan mengukur kemampuan kognitif dimana aspek yang diukur adalah kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi.

#### **1.4.3 Bagi Lembaga**

Dengan penelitian ini dapat membantu dan memperbaiki implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang salah, maka permasalahan perlu di batasi. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada pengetahuan terhadap Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Guru Mata Pelajaran PJOK SD Negeri Se-Kecamatan Sukosewu.

